

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selain itu juga untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali potensi sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan di daerahnya melalui PAD. Wewenang pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dan anggaran daerahnya disebut dengan kebijakan desentralisasi fiskal.

Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah menjelaskan bahwa retribusi dibagi atas 3 (tiga) golongan, yaitu (i) Retribusi jasa umum; (ii) Retribusi jasa usaha; dan (iii) Retribusi perizinan tertentu. Sedangkan Izin Mendirikan Bangunan sendiri merupakan salah satu jenis retribusi yang dipungut pemerintah daerah melalui dinas terkait, dalam hal ini Dinas Tata Kota dan Bangunan yang merupakan bagian dari golongan retribusi perizinan tertentu.

Salah satu daerah yang memiliki porsi penerimaan dari retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang cukup besar adalah Kabupaten Bone. Izin mendirikan Bangunan sendiri merupakan izin yang wajib dimiliki oleh orang perorangan atau badan yang akan melaksanakan

pembangunan bangunan. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan menjadi bagian dari kabupaten Bone sebagai kota yang berkembang pesat, yang tak pelak lagi menimbulkan adanya pembangunan di segala bidang, mulai dari bangunan dengan fungsi hunian, usaha, sosial budaya, keagamaan dan bangunan dengan fungsi lainnya.

Melayani publik dan dengan memperhatikan tuntutan dan tantangan globalisasi maka kebijakan reformasi birokrasi menjadi landasan kuat bagi semua aparatur untuk mencapai tiga sasaran Reformasi Birokrasi yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dan meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Peningkatan kualitas pelayanan publik diharapkan mampu meningkatkan minat pelaku usaha untuk melakukan investasi dan pengembangan usaha yang dapat membantu meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat serta berdampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Semakin besarnya kebutuhan untuk melaksanakan pemerintahan pada Kabupaten Bone, maka diperlukan upaya yang semaksimal mungkin dalam menggali potensi-potensi sumber penerimaan. PAD sebagai sumber kemandirian penerimaan daerah terus diupayakan sehingga mampu membiayai beban pembiayaan daerah, baik dalam pelaksanaan pemerintahan maupun dalam pembangunan. Retribusi sebagai salah satu sumber PAD, juga memiliki peranan di Kabupaten Bone sendiri, retribusi Izin Mendirikan Bangunan memegang peranan dominan jika dibandingkan dengan jenis retribusi yang lain.

Pada Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) di Kabupaten Bone, penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu merupakan bagian yang integral dari pelayanan publik yang mengamanatkan kepada aparatur untuk melaksanakan tugas pelayanan dengan

prinsip pelayanan prima yang pada akhirnya memberikan kepuasan kepada masyarakat sesuai tugas dan fungsi yaitu melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

Pemberian pelayanan yang optimal kepada masyarakat, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu didukung oleh pegawai sebanyak 45 orang dengan melayani 22 kewenangan perizinan. Personil yang akan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat diharapkan memiliki tingkat keahlian dan keterampilan atau kompetensi.

Tabel 1.
Target dan Realisasi Retribusi IMB Kabupaten Bone Tahun 2011-2015 (dalam
milyar rupiah)

Tahun	Target IMB	Realisasi IMB	%	Target PAD	Realisasi PAD	%
2011	Rp1.530	Rp2.049	134%	Rp 60.438	Rp 34.415	56%
2012	Rp2.000	Rp2.384	119%	Rp 56.479	Rp 52.348	92%
2013	Rp2.600	Rp2.779	106%	Rp 85.928	Rp 85.895	99%
2014	Rp2.860	Rp2.895	101%	Rp149.206	Rp155.428	104%
2015	Rp3.035	Rp3.173	105%	Rp156.422	Rp160.000	102%

Sumber: Badan Pelayanan Perizinan Terpadu & Dispenda Kabupaten Bone

Realisasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kabupaten Bone mengalami peningkatan di setiap tahunnya dan selalu melampaui target yang telah ditetapkan. Adapun realisasi dari PAD

hanya pada tahun 2014 dan 2015 yang tercapai, sedangkan pada tahun 2011 hingga 2013 target yang telah ditentukan tidak tercapai.

Penentuan target IMB di setiap tahunnya berdasarkan potensi pada tahun tersebut, bukan pada tahun sebelumnya, karena bisa saja potensi pada tahun itu lebih kecil dibandingkan pada tahun sebelumnya. Target PAD dinaikkan setiap tahunnya, sebaliknya target yang ditetapkan oleh IMB pun menurun. Besarnya target dalam IMB ditentukan melalui rapat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Adapun indikator dalam menetapkan target IMB yaitu kondisi geografis Kabupaten Bone yang sangat luas sehingga memungkinkan pemerintah untuk memungut biaya retribusi IMB yang setiap tahunnya meningkat.

Langkah-langkah dalam merealisasikan targetnya yaitu salah satunya dengan menjemput izin ke kecamatan-kecamatan yang ada di kabupaten Bone, sehingga masyarakat di kecamatan tidak perlu lagi ke kota untuk melakukan kepengurusan IMB. Target yang ditetapkan IMB cenderung mengalami kenaikan dari realisasi tahun sebelumnya, seperti pada tahun 2013 hingga 2015. Pada tahun 2013 target meningkat Rp216.000.000 dari realisasi tahun sebelumnya. Pada tahun 2014 mengalami peningkatan Rp81.000.000 dan pada tahun 2015 meningkat Rp140.000.000. Penentuan target dari IMB tidak ditentukan pada realisasi tahun sebelumnya, maka dari itu penulis perlu melakukan evaluasi untuk mengetahui keefektifannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana evaluasi retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Bone ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penyimpangan dari retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Bone.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Sebagai bahan kajian ilmiah dari teori-teori yang pernah didapat dan mengaplikasikan secara empiris di dunia nyata dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak lain yang ingin mengetahui secara lebih mendalam khususnya tentang retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai sumber pendapatan asli daerah.
- b. Sebagai sumbangsih pemikiran dan bahan masukan bagi perusahaan/instansi dalam upaya meningkatkan kinerja karyawan.
- c. Sebagai bahan perbandingan dan bahan penelitian berikutnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil peneliti yang telah dibahas, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Secara umum, evaluasi retribusi Izin Mendirikan Bangunan Kabupaten Bone dinilai memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bone yang mampu meningkatkan pertumbuhan pendapatan yang lebih tinggi.
2. Secara khusus, laporan target dan realisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bone selama lima tahun terakhir (2011 – 2015) menunjukkan hasil yang positif terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bone. Artinya, retribusi Izin Mendirikan Bangunan berjalan efektif karena menambah jumlah pendapatan asli daerah Kabupaten Bone dan terbukti dengan realisasi IMB yang setiap tahunnya melampaui target yang telah ditetapkan.

B. Saran

Mengacu pada kesimpulan yang dijelaskan tersebut di atas, maka penulis mengajukan saran yaitu sebagai berikut:

1. Agar Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) di Kabupaten Bone harus lebih berani dalam menetapkan target, karena pada penelitian yang dilakukan selama lima tahun terakhir (2011-2015) realisasi selalu jauh melampaui target yang telah ditetapkan.

2. Agar Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kabupaten Bone lebih percaya diri termasuk meningkatkan potensi-potensi sumber retribusi.